



Media: Koran Tempo

Hari: Kamis

Tanggal: 20 Oktober 2016

Halaman: 23

Yogya Uji Coba Kartu Indonesia Pintar Plus

TEMPOPLUS ERLANGA



Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad (kiri) memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Lima persen kartu ditarik karena tidak tepat sasaran.

Iqbal Muhtarom
miqbal@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memilih Kota Yogyakarta sebagai wilayah uji coba penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Plus. Sebanyak 1.295 siswa sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan di kota ini akan menerima KIP Plus.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Hamid Muhammad, mengatakan uji coba ini dilakukan hingga 31 Desember mendatang. "Jika bisa berjalan dengan baik akan berlanjut ke 44 daerah lainnya," kata Hamid saat pemberian KIP di SMA Negeri 9 Yogyakarta, kemarin.

Menurut dia, berbeda ketimbang jenis kartu sebelumnya, KIP Plus sudah berfungsi sebagai kartu debit. Di dalamnya tersimpan sejumlah dana yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Adapun untuk KIP model lama, penerima harus mencairkan dana melalui bank yang harus mencocokkan data penerima dengan data pokok pendidikan milik Kementerian Pendidikan.

Melalui KIP Plus, Hamid menuturkan, siswa dimudahkan karena sebagian dana yang masuk bisa ditarik tunai dan kartu bisa digunakan untuk berbelanja di sejumlah toko tertentu yang sudah ditunjuk. Ia berharap, dengan model baru ini, jumlah pencairan dana bantuan bisa segera meningkat. Sebab, tahun ini saja, dari 11 juta penerima bantuan secara nasional, baru 4,5 juta siswa yang mencairkannya.

Adapun 1.295 penerima KIP Plus itu terbagi atas 629 siswa SMP, 142 siswa SMA, dan 524 siswa SMK. Setiap siswa SMP akan menerima Rp 375 ribu per semester, dan siswa SMA/SMK Rp 500 ribu per semester. Sedangkan siswa SD diberikan Rp 225 ribu per semester. "Siswa peneri-

ma bisa membelanjakannya untuk kebutuhan sekolah," ujar Hamid.

Hamid menjelaskan, siswa penerima KIP Plus sudah melalui verifikasi dan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pendidikan. Selama ini, kata dia, Kementerian Pendidikan menghadapi sejumlah kendala, terutama menyangkut data siswa penerima bantuan. Pihaknya selama ini bergantung pada pasokan data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Akibat persoalan data ini, Kementerian Pendidikan menarik 5 persen kartu yang dinilai tidak tepat sasaran. Di antaranya data penerima ganda, siswa tidak ditemukan, pindah kependudukan, meninggal dunia, atau siswa tidak berasal dari keluarga miskin.

Hamid menambahkan, banyak auditor yang mempertanyakan apakah bantuan yang diberikan tepat sasaran atau bisa disalurkan tepat waktu atau tidak. Tahun lalu, ada sekitar 10 persen bantuan yang tidak tersalurkan.

Penyaluran bantuan juga kadang-kadang terhambat kapasitas bank dalam menyalurkan bantuan.

● ANTARA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Dindik	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005